

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi. 2016. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta. Rajawali Press.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Press. Jakarta. 2014
- Ali Achmad Chomsah. 2014. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.
- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHPidana*. Cetakan Kelima. Jakarta. Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 7. Jakarta. Sinar Grafika.
- Angger Sigit Prakmuti dan Erdha Widayanto. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2015
- Bachtiar Efendi. 2015. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung. Alumni.
- Boedi Harsono. 1997. *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta. Djambatan.

- Budi Untung. 2015. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta. ANDI.
- Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Revisi Keempat. Bandung. Nuansa Aulia.
- Dyara Radhite Oryza Fea. 2016. *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya*. Cet.1. Yogyakarta. Buku Pintar.
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Edi Asrofin. 2017. *Implikasi Adanya Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Oleh PPAT (Studi Kasus Daerah Kabupaten Batang)*. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semarang.
- Efa Rodiah. 2015. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung. Institut Islam Negeri.
- Elsa Syarif. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar: Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja.
- E Y. Kanter, SR. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Farida Pattitingi. 2008. *Ringkasan Disertasi Penguasaan Tanah Pulau-Pulau Kecil (Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia)*. Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan. 2017
- Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung. Rafika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan kedua. Bandung. Refika Aditama.

- Hans Kalsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi. General Theory Of law and State. Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta. BEE Media Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2006. *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. Teori Hukum Murni*. Bandung. Nuansa & Nusa Media.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan ke-4. Edisi Revisi. Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- Lamintang. P.A.F, Theo Lamintang. 2013. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat. Alat Pembayaran. Alat Bukti dan Peradilan*. Cetakan Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.
- Lidya Christina Wardhani. 2017. *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- M Isa Arif. 2016. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta. Intermasa.
- M Makhfdz. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi. 1. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Moch. Anwar. 1996. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHPidana Buku II)*. Bandung. Alumni.
- Moegni Djojodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung. Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Yogyakarta. Liberty.
- Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan 1. Bandung. Citra Aditya Bakti.

- P A F Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Pieter Latumeten. 2015. Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya. Surabaya
- Romli Atmasasmitha. 1993. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Eresco.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Gen Straft Zonder Schuld*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- R Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notaris di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta. Rajawali Press.
- R Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (serta Komentar-Komentar Pasal demi Pasal)*. Bogor. Politea.
- Ridwan H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Cetakan Kesebelas. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Salim H S. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sianturi. 1989. *Tindak Pidana Di KUHPidana Beserta Uraianya*. Jakarta. Alumni Ahaem Petehaem.
- Sjaifulrachman, Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung. Mandar Maju.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktik Notaris*. Jakarta. Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan. 2021. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Topo Santoso. 2001. Eva Achjani Zulva. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa.

Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung. Refika Aditama.

**JURNAL:**

David Tan. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Volume 8 Nomor 8. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Sumatera Utara.

Djoko Susanto. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pengawasan dan Pembinaan BPN Terhadap PPAT*. Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 6 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Endeng. 2019. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Di Bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang*. Jurnal Hukum Positum. Volume 4 Nomor 1. Universitas Singaperbangsa. Karawang.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2017. Hendry Dwicahyi Wanda. *Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 24 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

I Gusti Bagus Yoga Prawira. 2016. *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Taanah*. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS. Volume IV Nomor 1. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram.

Irfan Wijaya. 2022. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli*. Notary Journal. Volume 2 Nomor 2. Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.

Muhammad Muharromi. Henny Marlyna. 2021. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Tanda Tangan Blanko Kosong Dalam Pembuatan Akta Autentik*. Jurnal Kertha Semaya. Volume 9 Nomor 12. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

Nindia Viva Pramudha Wardani. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan

Kejahatan: Recidive. Volume VII Nomor 2. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Priski Athaya Fatimah. 2020. *Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 898K/PID/2018)*. Indonesian Notary. Volume 2 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Sri Wulan, Muh. Hasrul, Muh. Ilham Arisaputra. 2022. *Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Hilangnya Lembar Pertama Akta*. Jurnal Widya Pranata Hukum. Volume 4 Nomor 1. Gakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Mataram.

Taifah Ipung, Yasarman. 2022. *Aspek Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Umum*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Volume VI. Nomor 3. Universitas Tunggadewi. Malang.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Stafrecht*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan. Hak atas Tanah. Satuan Rumah Susun. dan Pendaftaran Tanah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/Kep-4.1/IV/2017 terkait Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laoratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

**WEBSITE:**

Agus Riyanto. *Penegakan Hukum. Masalahnya Apa?*. diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>. pada Tanggal 02 Mei 2023

Annisa Medina Sari. Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat. diakses melalui: <https://fahum.umsu.ac.id/pengetahuan-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>. pada Tanggal 01 Juli 2023. Pukul 16:00 WITA

Binus University Bussines Law. Niat Jahat. diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/18/niat-jahat/>. pada Tanggal 03 Februari 2023

HukumOnline.com. Motif dan Niat Dalam Tindak Pidana. diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-dan-niat-dalam-tindak-pidana-lt6368c05bb7e1c>. pada Tanggal 03 Februari 2023

Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. diakses melalui: [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). pada Tanggal 04 Mei 2023

KBBI Daring. diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> pada Tanggal 1 Februari 2023. Pukul 20:30 WITA